

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PAREPARE

Muh. Iqbal Latief¹⁾, Andi Ahmad Hasan Tenriliweng²⁾, Atma Ras³⁾, Pratiwi Wulandari⁴⁾, Ahmad Muhajir⁵⁾, Nur Vidiah Rachmadani⁶⁾, Ahmad Akramullah⁷⁾

^{1,2,3,4,6,7} Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia

¹muhilberkelana@gmail.com, ²ahmadhasan@unhas.ac.id, ³atmaras@unhas.ac.id, ⁴pratiwiwulandari21@gmail.com,
⁵ahmadajir@universitasbosowa.ac.id, ⁶vidiarachmadani@gmail.com, ⁷akramullah2304@gmail.com

Diterima 23 November 2025, Direvisi 30 Desember 2025, Disetujui 31 Desember 2025

ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Parepare menjadi permasalahan serius yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah. Hingga Oktober 2025, realisasi PKB baru mencapai Rp62,1 miliar dari target Rp73 miliar. Berbagai studi yang mengkaji tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Parepare dan hasil evaluasi semester pertama 2025 yang dilaksanakan Bapenda Kota Parepare, menyimpulkan bahwa permasalahan ini tidak hanya disebabkan faktor ekonomi dan administratif, tetapi juga faktor sosial-budaya seperti rendahnya kesadaran pajak, minimnya literasi fiskal, dan belum optimalnya pemanfaatan komunitas sebagai agen perubahan perilaku. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi awal melalui *Focus Group Discussion* (FGD), penyuluhan terpadu yang dihadiri 25 peserta dari berbagai elemen masyarakat, serta pembentukan "Komunitas Taat Pajak" yang terdiri dari Karang Taruna, komunitas ojek online, dan perwakilan wajib pajak. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif selama kegiatan, analisis diskusi dan testimoni peserta, serta dokumentasi komitmen kolektif yang tertuang dalam Piagam Komitmen dan MoU dengan Samsat Parepare. Hasil kegiatan menunjukkan perubahan paradigma masyarakat terhadap pajak dari beban administratif menjadi investasi sosial, terciptanya komitmen kolektif melalui penandatanganan Piagam Komitmen dan MoU dengan Samsat Parepare, serta terbentuknya jejaring sosial yang berpotensi menjadi penggerak kepatuhan berkelanjutan. Program ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas efektif membangun kesadaran fiskal dan modal sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat lokal.

Kata kunci: *Kepatuhan Pajak; Komunitas; Pemberdayaan Masyarakat; Pajak Kendaraan Bermotor; Kota Parepare.*

ABSTRACT

The low compliance of the community in paying Motor Vehicle Tax (PKB) in Parepare City has become a serious problem that hinders the optimization of regional revenue. Until October 2025, PKB realization only reached Rp62.1 billion out of a target of Rp73 billion. Various studies examining the level of community compliance in paying motor vehicle tax in Parepare City and the results of the first semester 2025 evaluation conducted by *Bapenda* (local term for Regional Revenue Agency) Kota Parepare concluded that this problem is not only caused by economic and administrative factors, but also socio-cultural factors such as low tax awareness, minimal fiscal literacy, and suboptimal utilization of communities as agents of behavioral change. This community service program aims to increase public compliance through a community-based approach by integrating sociological perspectives. Implementation methods include initial socialization through Focus Group Discussions (FGD), integrated counseling attended by 25 participants from various community elements, and the establishment of a "Tax-Compliant Community" consisting of *Karang Taruna*, online motorcycle taxi communities, and taxpayer representatives. Evaluation was conducted through participatory observation during activities, analysis of participant discussions and testimonies, as well as documentation of collective commitment outlined in the Commitment Charter and MoU with *Samsat* Parepare. The results of the activity show a paradigm shift in the community's perception of taxes from administrative burden to social investment, the creation of collective commitment through the signing of the Commitment Charter and MoU with *Samsat* Parepare, as well as the

formation of social networks that have the potential to become drivers of sustainable compliance. This program demonstrates that a community-based approach is effective in building fiscal awareness and social capital necessary to increase tax compliance at the local level.

Keywords: *Tax Compliance; Community; Community Empowerment; Motor Vehicle Tax; Parepare City.*

PENDAHULUAN

Kota Parepare merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kendaraan bermotor yang cukup besar, tercatat sebanyak 152.284 unit pada tahun 2023 (BPS Sulsel, 2024). Meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dan berpotensi menghasilkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang signifikan, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Parepare terhadap pembayaran pajak masih tergolong rendah. Data dari Bapenda Kota Parepare menunjukkan bahwa hingga trimester kedua tahun 2025, hanya 40 persen wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu, sementara 60 persen lainnya menunggak (Data Bapenda Kota Parepare, 2024; (Latief et al., 2024)). Realisasi penerimaan PKB hingga Oktober 2025 baru mencapai Rp62,1 miliar atau 84,9 persen dari target Rp73 miliar, dengan proyeksi shortfall sebesar Rp10,9 miliar jika tren kepatuhan tidak membaik.

Kajian (Latief et al., 2024) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan ini tidak hanya disebabkan oleh hambatan ekonomi dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang membentuk perilaku wajib pajak. Program inovasi seperti Samsat Keliling dan e-Samsat yang telah diterapkan belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan secara optimal, mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan aspek sosial-budaya masyarakat.

Dari sisi sosial, masyarakat Kota Parepare memiliki ikatan komunitas yang kuat, terutama melalui organisasi keagamaan, komunitas hobi otomotif, dan kelompok sosial lainnya. Komunitas ini sebenarnya berpotensi besar sebagai agen perubahan perilaku membayar pajak, namun sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal (BAJ et al., 2023). Budaya lokal Parepare yang mengutamakan hubungan sosial dan kekeluargaan kadang berdampak pada ketidakpatuhan administratif, termasuk dalam membayar pajak kendaraan (Putri, Rachman, & Christian, 2024). Ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa membayar pajak tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan pribadi mereka, terutama bila kondisi infrastruktur jalan dianggap kurang memadai (Darmawan & Wirasedana, 2022).

Mutu layanan administrasi pajak di Kota Parepare masih menghadapi tantangan signifikan meskipun telah dilakukan digitalisasi pelayanan

melalui Samsat Keliling dan Samsat Online. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 yang dilakukan secara mandiri oleh Samsat Kota Parepare menunjukkan skor 83,999 atau predikat B, berdasarkan sembilan unsur penilaian pelayanan (U1-U9) yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan. Evaluasi lebih mendalam terhadap layanan Samsat Keliling menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 78,5 persen, sementara Samsat Online mencapai 81,2 persen, dengan keluhan utama terkait keterbatasan jadwal operasional Samsat Keliling dan kendala teknis aplikasi Samsat Online yang belum user-friendly. Survei kepuasan layanan juga mengungkapkan bahwa 65 persen responden menyatakan kurangnya sosialisasi terkait kebijakan baru dan 58 persen mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pembayaran daring. Permasalahan mendasar yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi pajak, terutama di kalangan masyarakat menengah bawah yang merupakan mayoritas pemilik kendaraan bermotor. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan banyak wajib pajak menunda bahkan mengabaikan kewajiban pembayaran PKB, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target penerimaan daerah (Latief et al., 2024).

Kesenjangan sosial ekonomi juga menjadi faktor penting, di mana kelompok ekonomi bawah sering kali mengutamakan kebutuhan pokok dibanding membayar pajak kendaraan bermotor (Krishnadeva & Lely Aryani Merkusiawati, 2020). Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya sistem data administrasi kendaraan, yang menyebabkan tidak sinkronnya data antara pemilik kendaraan dengan data Samsat (Latief et al., 2024).

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Pemerintah di Kota Parepare terkhusus Bapenda Kota Parepare adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan tua atau kendaraan modifikasi yang mereka rasa tidak perlu lagi membayar pajak penuh (Darmawan & Wirasedana, 2022). Selain itu, komunitas-komunitas sosial belum dilibatkan secara aktif dalam program edukasi kepatuhan pajak, padahal mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat. Minimnya program edukasi berbasis komunitas menyebabkan peluang untuk

membangun budaya sadar pajak berbasis komunitas belum terwujud (BAJ et al., 2023).

Sinergi antara Samsat Parepare dengan komunitas sosial belum terjalin optimal, baik dalam bentuk kolaborasi edukasi maupun insentif kolektif berbasis komunitas. Program insentif seperti potongan pajak kolektif atau penghargaan komunitas taat pajak masih kurang (Latief et al., 2024). Terakhir, kendala teknologi juga menjadi hambatan, di mana adopsi aplikasi Samsat Online masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi penggunaan di tingkat komunitas. Semua kondisi ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Parepare, pendekatan berbasis komunitas menjadi sangat relevan dan diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural yang ada.

Melihat situasi ini, jelas bahwa permasalahan Pemerintah Kota Parepare terkhusus Bapenda Kota bukan hanya persoalan teknis administratif atau ekonomi semata, melainkan melibatkan faktor sosial, budaya, mutu layanan, serta nilai-nilai kolektif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, program peningkatan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor berbasis komunitas di Kota Parepare perlu diarahkan tidak hanya pada perbaikan layanan, tetapi juga pada penguatan nilai sosial baru yang menempatkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari identitas komunitas yang positif.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian ini dirancang untuk mengimplementasikan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh Pemerintah Kota terkhusus Bapenda Kota Parepare. Metode pelaksanaan disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, mutu layanan, dan kehidupan bermasyarakat, serta memastikan partisipasi aktif mitra di setiap tahap kegiatan.

Persiapan Dan Sosialisasi Awal Program

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan pemerintah kota dan tokoh masyarakat untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan program. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga semua pihak dapat memahami pentingnya perbaikan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan masukan tentang bentuk keterlibatan komunitas. Di tahap ini, juga dilakukan identifikasi mitra komunitas yang bersedia menjadi pilot project program "Komunitas Taat Pajak".

Pelaksanaan Penyuluhan Terpadu Berbasis Komunitas

Kegiatan penyuluhan dilakukan secara tatap muka di lokasi program "Komunitas Taat Pajak" yaitu di Ruang Rapat Kantor Samsat Kota Parepare, dengan metode ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok kecil. Penyuluhan ini dihadiri oleh 25 orang peserta yang diwakili kepolisian, tokoh masyarakat, karang taruna, mahasiswa, serta warga yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Materi penyuluhan disesuaikan dengan konteks budaya lokal, menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat Kota Parepare dan mengaitkan pentingnya membayar pajak dengan solidaritas sosial komunitas. Penyuluhan difokuskan tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga pada membangun nilai kolektif bahwa taat pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial.

Tabel 1. Frekuensi Kehadiran Peserta

No	Status	Frekuensi	Persentase
1	Kepolisian	4	16%
2	Tokoh Masyarakat	2	8%
3	Karang Taruna	6	24%
4	Mahasiswa	5	20%
5	Warga Wajib Pajak	8	32%
Total		25	100%

Sumber: Olahan Data Lapangan

Tabel 2. Frekuensi Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	16	64%
2	Perempuan	9	36%
Total		25	100%

Sumber: Olahan Data Lapangan

Pembentukan Dan Penguatan "Komunitas Taat Pajak"

Setelah penyuluhan, komunitas difasilitasi untuk mendeklarasikan komitmen mereka dalam bentuk piagam bersama yang ditandatangani oleh seluruh anggota. Komunitas yang tergabung mendapatkan panduan-panduan praktis dalam meningkatkan kesadaran internal anggotanya terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu. Setelah itu dilanjutkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Samsat Pare-Pare dan komunitas terbentuk untuk menjaga keberlanjutan program edukasi sadar pajak berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan Kegiatan

Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk *“Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Komunitas di Kota Parepare Tahun 2025”* dilaksanakan pada pukul 13.30 WITA di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Parepare. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana yang penuh semangat dan antusiasme dari peserta yang terdiri atas perwakilan masyarakat, kepolisian, tokoh masyarakat, karang taruna, mahasiswa, serta warga yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan

Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Tawakkal, selaku Kasubbag Bapenda Kota Parepare, yang dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Namun beliau juga mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah direalisasikan. Berdasarkan data Bapenda UPT Parepare, hingga akhir Oktober tahun ini, realisasi pajak baru mencapai Rp 62,1 miliar dari target sebesar Rp 73 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Parepare dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dinilai strategis sebagai bagian dari upaya kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun kesadaran pajak berbasis komunitas.



Gambar 2. Sambutan Oleh Bapak Tawakkal, Kasubbag Bapenda Kota Parepare

Dalam sesi pembukaan, tim pengabdian dari Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh Dr.

Muh. Iqbal Latief, M.Si, memperkenalkan konsep *“Komunitas Taat Pajak”* sebagai model pemberdayaan sosial yang memadukan pendekatan edukatif dan kolektif. Peserta kemudian diajak memahami bahwa kepatuhan pajak bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bentuk partisipasi sosial yang berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya solidaritas komunitas dalam mendorong budaya sadar pajak di Kota Parepare. Untuk mencairkan suasana, kegiatan dilanjutkan dengan *ice breaking* singkat yang mengangkat tema *“Pajak untuk Kita”*, di mana peserta saling berbagi pengalaman terkait kendala dan motivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Aktivitas ini tidak hanya membangun kedekatan antarpeserta, tetapi juga menjadi sarana refleksi sosial atas pentingnya kepatuhan kolektif terhadap kebijakan publik.

Tahap akhir pembukaan ditandai dengan pembentukan kontrak sosial antara peserta dan panitia, di mana setiap komunitas yang hadir menyatakan komitmennya untuk menjadi agen penyadaran pajak di lingkungannya masing-masing. Penandatanganan *piagam komitmen awal* oleh perwakilan komunitas menjadi simbol dimulainya rangkaian kegiatan pengabdian yang berorientasi pada perubahan perilaku sosial menuju masyarakat yang lebih taat pajak dan berdaya secara kolektif. Dokumentasi berupa foto bersama antara tim pengabdian, perwakilan Bapenda, dan para peserta mengakhiri sesi pembukaan dengan nuansa optimisme dan semangat kolaborasi yang tinggi.

Pelaksanaan Sosialisasi

Materi inti dalam kegiatan sosialisasi ini berfokus pada upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat Parepare agar lebih patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemaparan dibuka dengan menyoroti pentingnya PKB sebagai tulang punggung pendapatan daerah yang menopang berbagai program pembangunan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Parepare, realisasi penerimaan PKB hingga Oktober 2025 baru mencapai Rp62,1 miliar dari target Rp73 miliar, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak. Fakta ini menjadi pintu masuk diskusi sosiologis tentang relasi antara negara dan warga dalam konteks tanggung jawab fiskal serta kepercayaan sosial terhadap institusi publik.

Fasilitator membuka dengan menguraikan faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak sebagaimana dipetakan oleh (Salam, 2025), yakni kesadaran, pengetahuan, dan sanksi. Dalam perspektif sosiologi, ketiganya membentuk ekosistem perilaku kolektif yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan norma komunitas. Kesadaran

tidak hanya berakar pada pemahaman rasional tentang hukum pajak, tetapi juga pada moralitas sosial, kesadaran bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam kesejahteraan bersama. Pengetahuan berfungsi memperkuat kapasitas individu dalam memahami hak dan kewajiban fiskal, sementara sanksi berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga keteraturan perilaku.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Dr. Muh. Iqbal Latief

Selanjutnya dibahas hasil juga penelitian (Ningsih et al., 2025) yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2020), kesadaran berperan membentuk sikap positif terhadap pajak, norma subjektif yang mendorong kepatuhan, serta persepsi kontrol perilaku. Artinya, jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan merasakan dukungan sosial dari komunitasnya, mereka akan lebih mudah menginternalisasi perilaku patuh pajak sebagai nilai sosial yang harus dijalankan bersama.

Dalam konteks komunitas Parepare, faktor sosial-komunal menjadi kunci. Seperti ditunjukkan oleh (Purnomo et al., 2025) dalam program pemberdayaan ojek pangkalan di Banyuwangi, pendekatan berbasis komunitas (*community-based empowerment*) mampu meningkatkan kepatuhan hukum dan kesadaran administratif melalui partisipasi aktif warga. Pendekatan semacam ini relevan diterapkan di Parepare, mengingat struktur sosialnya yang masih kental dengan solidaritas komunal. Pembentukan “Komunitas Taat Pajak” bukan hanya forum administratif, tetapi juga arena sosial tempat nilai kepatuhan dibentuk, dinegosiasikan, dan diwariskan secara kolektif.

Dari sisi struktural, (Salsabella & Isnawati, 2024) menegaskan bahwa faktor penghambat kepatuhan sering kali bersumber dari birokrasi yang rumit, keterbatasan akses layanan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan pajak. Di Parepare, problem semacam ini masih dirasakan oleh masyarakat yang

menganggap prosedur pembayaran pajak melelahkan dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemaparan materi menekankan perlunya reformasi pelayanan publik berbasis teknologi seperti e-Samsat, yang tidak hanya efisien tetapi juga memperkuat kepercayaan sosial dengan menampilkan transparansi sistem. Menindaklanjuti hal tersebut, peserta dikenalkan pada temuan (Maghfira et al., 2023) tentang efektivitas layanan e-Samsat di Jawa Barat. Dalam penelitian Syahla menunjukkan bahwa layanan digital hanya efektif jika diikuti dengan sosialisasi yang intensif dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka sosiologi pelayanan publik, hal ini menegaskan bahwa teknologi bukan semata alat, melainkan bagian dari transformasi sosial yang memerlukan adaptasi budaya digital dan literasi fiskal masyarakat. Keterlibatan komunitas lokal dalam proses sosialisasi akan mempercepat internalisasi sistem baru ini di Parepare.

Materi kemudian mengurai keterkaitan antara pengetahuan pajak dan keadilan sosial. Berdasarkan pandangan (Salsabella & Isnawati, 2024), pemahaman pajak yang memadai membangun persepsi keadilan distributive, dimana masyarakat yang merasa pajaknya dikelola secara adil cenderung lebih patuh. Dalam forum diskusi, peserta diajak merenungkan bagaimana hasil pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan publik. Dialog ini penting karena memperkuat kontrak sosial antara warga dan pemerintah, di mana pajak dipahami bukan sebagai beban, tetapi sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Dari perspektif teori atribusi sosial (Heider; Weiner dalam (Salsabella & Isnawati, 2024)), kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara atribusi internal (pengetahuan dan kesadaran) dan atribusi eksternal (sanksi, kebijakan, dan tekanan sosial). Dalam diskusi, peserta menilai bahwa keteladanan pejabat publik dan konsistensi penerapan sanksi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku warga. Ketika masyarakat melihat adanya keadilan dan konsistensi dalam penerapan aturan, mereka cenderung merespons dengan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Fasilitator juga mengajak peserta menelaah hubungan antara sanksi administratif dan moralitas sosial. Berdasarkan studi (Alm et al. (2010) dalam tinjauan (Salsabella & Isnawati, 2024)), efektivitas sanksi tidak bergantung pada kerasnya hukuman, melainkan pada persepsi keadilan. Dalam masyarakat seperti Parepare, di mana hubungan sosial bersifat dekat dan hierarkis, mekanisme sosial seperti malu (*social shame*) dan pengakuan sosial lebih efektif dibanding hukuman formal. Oleh karena itu, strategi penguatan kepatuhan perlu

menekankan pengawasan berbasis komunitas yang mendorong tanggung jawab moral bersama.

Pemaparan berikutnya menyoroti pentingnya kepercayaan terhadap institusi fiskal sebagai modal sosial kepatuhan. Studi empiris Niken Rahayu menunjukkan bahwa individu yang percaya pada pengelolaan pajak akan lebih taat membayar. Kepercayaan ini tumbuh dari interaksi sosial yang transparan dan akuntabel antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kepercayaan semacam ini dapat dipandang sebagai modal simbolik yang memperkuat legitimasi negara di mata warganya. Dari sisi inovasi pelayanan, peserta diperkenalkan pada hasil penelitian (Maghfira et al., 2023) bahwa hambatan digital dan literasi teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan e-Samsat. Maka, dalam pengabdian ini, pendampingan tidak hanya fokus pada sosialisasi prosedural, tetapi juga membangun *digital inclusion* bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Pendekatan ini menggabungkan unsur edukatif dan partisipatif agar setiap lapisan masyarakat dapat ikut serta tanpa hambatan struktural.

Diskusi juga memperkuat pandangan bahwa komunitas sosial memiliki peran ganda, dimana komunitas sosial ini bisa sebagai medium sosialisasi dan sebagai pengontrol sosial. Sebagaimana ditemukan oleh (Purnomo et al., 2025), komunitas ojek di Banyuwangi berhasil membentuk mekanisme tabungan kolektif dan disiplin hukum melalui solidaritas internal. Di Parepare, strategi serupa dapat diterapkan melalui kelompok hobi, pengemudi ojek, dan organisasi masyarakat, sehingga kepatuhan pajak tumbuh sebagai budaya sosial yang dihidupi bersama, bukan sekadar kewajiban administratif. Dalam konteks teoritik, materi menekankan hubungan erat antara kepatuhan fiskal dan *social capital*. Kepercayaan, norma, dan jaringan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan kampanye sadar pajak. Partisipasi masyarakat Parepare dalam kegiatan ini menunjukkan bagaimana interaksi sosial dapat menjadi instrumen efektif untuk mengubah perilaku kolektif. Kepatuhan pajak yang berkelanjutan hanya mungkin tercapai ketika modal sosial masyarakat diperkuat dan diarahkan pada tujuan publik.

Pemaparan diakhiri dengan ajakan reflektif, bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bukan hanya tindakan ekonomi, tetapi juga praktik kewargaan (*citizenship practice*). Dalam konteks sosiologi pembangunan, kepatuhan fiskal mencerminkan hubungan dialektis antara warga dan negara di mana partisipasi, kepercayaan, dan solidaritas menjadi dasar keberlanjutan pembangunan lokal. Melalui kegiatan pengabdian

berbasis komunitas ini, diharapkan lahir transformasi sosial di Parepare, dari kepatuhan yang bersifat administratif menuju kepatuhan yang berlandaskan kesadaran moral dan komitmen kolektif untuk memajukan daerahnya sendiri.

Diskusi

Sesi diskusi berlangsung secara interaktif dengan partisipasi aktif dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang sosial seperti kelompok pemuda, mahasiswa, perwakilan masyarakat, kepolisian. Antusiasme peserta tampak dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, dan testimoni yang menunjukkan kesadaran baru akan pentingnya membayar pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial. Diskusi dipandu secara terbuka agar setiap peserta merasa memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka terhadap sistem perpajakan daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Peserta pertama, perwakilan dari perwakilan masyarakat, mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka masih enggan membayar pajak tepat waktu karena merasa prosedur administrasi terlalu rumit dan tidak efisien. Mereka menilai pelayanan pajak masih terkesan birokratis dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ritme kerja masyarakat lapangan. Dari pandangan sosiologis, hal ini mencerminkan adanya *cultural lag*, ketertinggalan budaya antara sistem administratif modern dengan realitas sosial masyarakat yang menuntut pelayanan cepat dan fleksibel.

Perwakilan dari kelompok pemuda menyoroti persoalan lain, yakni minimnya pemahaman terhadap fungsi sosial pajak. Mereka menyebutkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pajak hanya sebagai kewajiban negara, bukan sebagai bentuk gotong royong untuk pembangunan. Dalam konteks teori *social exchange* (Blau, 2017), pandangan ini menggambarkan hubungan timbal balik yang belum seimbang antara warga dan pemerintah. Masyarakat baru akan patuh jika merasa ada imbal hasil yang nyata, seperti perbaikan infrastruktur atau peningkatan pelayanan publik.

Beberapa peserta juga mengangkat permasalahan literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat lanjut usia dan pedagang kecil. Mereka mengaku kesulitan menggunakan aplikasi e-Samsat karena terbatasnya kemampuan teknologi dan akses jaringan internet. Diskusi ini memperkuat temuan (Maghfira et al., 2023) yang menyebutkan bahwa keberhasilan inovasi digital dalam perpajakan bergantung pada kesiapan sosial, bukan hanya kesiapan teknis. Oleh karena itu, peserta menyarankan agar pelatihan e-Samsat berbasis komunitas dilakukan secara berkelanjutan, disertai

pendampingan tatap muka bagi kelompok rentan digital.

Peserta komunitas muda Parepare mengusulkan agar kampanye pajak dikemas dengan pendekatan kreatif, seperti lomba konten digital “Aksi Taat Pajak” atau gerakan *#PajakUntukParepare*. Ide ini menunjukkan bagaimana generasi muda memahami kepatuhan pajak sebagai bagian dari identitas sosial dan gaya hidup kewargaan. Dari perspektif sosiologi digital, hal ini mencerminkan munculnya *new civic engagement*, bentuk partisipasi sosial baru yang dimediasi teknologi dan media sosial.

Dalam sesi evaluasi, sebagian besar peserta mengakui bahwa kegiatan ini memberi mereka pemahaman baru tentang hubungan antara pajak, pembangunan, dan solidaritas sosial. Mereka mulai melihat pajak bukan sekadar beban, tetapi investasi sosial yang hasilnya akan kembali kepada masyarakat. Kesadaran semacam ini menandai pergeseran dari kepatuhan instrumental menuju kepatuhan normatif, sebagaimana dikemukakan (Fricke, 1976), bahwa individu patuh bukan karena takut hukuman, melainkan karena telah menginternalisasi nilai moral dari aturan sosial.

Diskusi diakhiri dengan penyampaian komitmen moral dari para peserta untuk menjadi “duta pajak komunitas.” Masing-masing kelompok bersepakat akan melakukan sosialisasi internal di lingkungannya, baik melalui pertemuan komunitas maupun media sosial. Penandatanganan simbolik *Piagam Komitmen Taat Pajak* dilakukan sebagai bentuk kesediaan kolektif untuk menjadi pelaku perubahan sosial di Parepare.

Secara sosiologis, sesi diskusi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku fiskal masyarakat tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, melainkan pada dinamika sosial yang melingkupinya. Kegiatan ini berhasil menciptakan ruang deliberatif tempat warga belajar, berdialog, dan membangun makna baru tentang pajak sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dengan demikian, program pengabdian ini tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi melahirkan *social learning process* yang memperkuat kapasitas warga Parepare sebagai aktor pembangunan daerah yang sadar dan bertanggung jawab.

Pembentukan dan penguatan “Komunitas Taat Pajak” dan Penandatanganan MoU Samsat Kota Parepare dan “Komunitas Taat Pajak”

Setelah sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan “Komunitas Taat Pajak” sebagai tindak lanjut nyata dari hasil pemaparan dan dialog sebelumnya. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan

kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara berkelanjutan. Pembentukan dilakukan secara musyawarah sederhana yang difasilitasi oleh tim pengabdian bersama perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Parepare. Dari hasil kesepakatan bersama, ditetapkan tiga perwakilan komunitas yang dianggap mampu mewakili berbagai kelompok sosial masyarakat.

Pertama, Karang Taruna dipilih sebagai perwakilan pemuda yang memiliki semangat tinggi dan jaringan sosial luas di tingkat kelurahan. Diharapkan kelompok ini menjadi penggerak utama dalam sosialisasi pajak di kalangan generasi muda dan pelajar. Kedua, komunitas otomotif, khususnya perwakilan dari komunitas ojek online, dipercaya menjadi penghubung antara masyarakat pengguna jalan dan pemerintah daerah. Anggota komunitas ini sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga dapat menjadi agen informasi sekaligus contoh nyata kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketiga, dibentuk perwakilan dari masyarakat wajib pajak, yaitu warga umum yang memiliki kendaraan pribadi. Kelompok ini diharapkan menjadi representasi masyarakat sipil yang secara langsung merasakan manfaat dari kepatuhan pajak, seperti perbaikan jalan dan pelayanan publik yang lebih baik.



Gambar 4. Sesi Foto Bersama Perwakilan Komunitas

Ketiga perwakilan komunitas ini sepakat untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak berbasis komunitas di wilayah Parepare. Tim pengabdian memberikan pendampingan awal berupa pembekalan singkat tentang fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah serta tata cara pembayaran PKB secara digital melalui aplikasi e-Samsat. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan simbolis *Piagam Komitmen Taat Pajak* oleh ketiga perwakilan komunitas, disaksikan oleh Bapak Tawakkal selaku Kasubbag Bapenda Parepare. Momen ini menjadi langkah awal terbentuknya jejaring sosial yang berkomitmen untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Dengan terbentuknya *Komunitas Taat Pajak*, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhenti pada tahap penyuluhan, tetapi juga melahirkan gerakan sosial berbasis komunitas yang diharapkan dapat berlanjut secara mandiri di tengah masyarakat Parepare.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat "Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Komunitas di Kota Parepare Tahun 2025" telah berhasil dilaksanakan dengan capaian yang signifikan. Program ini tidak hanya memberikan transfer pengetahuan tentang pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi pembangunan daerah, tetapi juga berhasil membangun kesadaran kolektif bahwa kepatuhan pajak merupakan wujud nyata partisipasi sosial dan tanggung jawab kewargaan. Hasil utama yang diperoleh adalah terbentuknya "Komunitas Taat Pajak" yang terdiri dari tiga pilar: Karang Taruna, komunitas ojek online, dan perwakilan wajib pajak umum, yang telah menandatangani Piagam Komitmen Taat Pajak dan MoU dengan Samsat Kota Parepare sebagai penanda dimulainya gerakan sosial berkelanjutan untuk mendorong kepatuhan pajak.

Kelebihan program ini terletak pada pendekatannya yang holistik dan partisipatif dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis dalam memahami perilaku kepatuhan pajak. Metode penyuluhan interaktif yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal Parepare terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan solidaritas komunal, serta menciptakan ruang deliberatif di mana warga dapat berdialog dan merumuskan solusi bersama. Namun, program ini masih memiliki keterbatasan, antara lain cakupan peserta yang terbatas (25 orang), kendala literasi digital terutama bagi kelompok lanjut usia, belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi jangka panjang yang terstruktur, serta fokus program yang baru menyentuh aspek kesadaran dan pengetahuan sementara faktor struktural seperti kualitas pelayanan dan transparansi penggunaan dana pajak belum sepenuhnya tersentuh.

Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan skala kegiatan ke seluruh kecamatan di Kota Parepare, program pendampingan berkelanjutan khususnya pelatihan e-Samsat berbasis komunitas, pengembangan sistem insentif kolektif seperti penghargaan komunitas terbaik, pembangunan platform digital untuk saling mengingatkan dan berbagi informasi, perluasan edukasi pajak daerah lainnya seperti PBB dan retribusi, serta studi dampak jangka panjang untuk

mengukur pengaruh program terhadap realisasi penerimaan PKB sehingga model ini dapat didokumentasikan sebagai *best practice* yang dapat direplikasi di daerah lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penghargaan tertinggi kami haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin atas dukungan komprehensif baik dalam aspek moril maupun finansial yang memungkinkan terselenggaranya program pengabdian ini dengan optimal. Apresiasi mendalam juga kami sampaikan kepada Pimpinan Bapenda Kota Parepare beserta seluruh staf yang telah memfasilitasi implementasi program melalui pemberian akses dan penyediaan sarana yang memadai. Secara khusus, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta program yang terdiri dari perwakilan kepolisian, tokoh masyarakat, Karang Taruna, mahasiswa, komunitas ojek online, serta warga wajib pajak kendaraan bermotor yang telah menunjukkan dedikasi tinggi, keterlibatan penuh, dan antusiasme berkelanjutan sepanjang proses pengabdian berlangsung. Semoga kegiatan ini bermakna dan berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan pajak serta kesejahteraan bersama masyarakat Kota Parepare.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- BAJ, T. D. W., BAJ, D. R., BAJ, T. T., & BAJ, M. H. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>
- Blau, P. M. (2017). *Exchange and Power in Social Life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203792643>
- BPS Sulsel. (2024). *Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2024*.
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i07.p07>
- Fricke, P. (1976). *A Comparative Analysis of Complex Organizations*, by Amitai Etzioni.

- Political Science Quarterly, 91*(2), 341–342.
<https://doi.org/10.2307/2148419>
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi, 30*(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p07>
- Latief, M. I., Patawari, Suharsih, M., Wulandari, P., Muhajir, A., & Akhmad, M. A. (2024). *Kajian Kepatuhan Membayar Pajak Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024*.
- Maghfira, S. A., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2023). *Efektivitas Penerapan Layanan E-Samsat Oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat*. 3(1).
- Ningsih, N. R., Marlina, L., & Fatmayanti. (2025). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Empiris Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner, 2*(3), 675–685. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jrpi/article/view/33768/11373>
- Purnomo, T., Rachman, A., Wisdaningrum, O., Asyriana, S., & Abdullah, H. (2025). Pemberdayaan Komunitas Ojek Pangkalan untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum dan Sistem Tabungan Kolektif. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, 2*(1), 1–18. <https://doi.org/10.62734/ipm.v2i1.638>
- Salam, F. N. (2025). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Cimahi Tahun 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 5*(3), 7732–7746. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19867/13429>
- Salsabella, S., & Isnawati, I. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin 1. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1*(4), 271–285. <https://doi.org/10.62335/k824rd95>